

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik**

###### **2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik**

Sistem Pengendalian Manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang berkaitan, yaitu: pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien (Suadi, 2001).

Sistem Pengendalian Manajemen adalah struktur dan proses yang sistematis serta terorganisir yang digunakan manajemen di dalam pengendalian manajemennya (Anthony, Dearden & Bedford, 2003).

Sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban, yang hakikatnya untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal (Sukarno, 2004)

Berdasarkan atas pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terstruktur dan terorganisir yang dapat dipergunakan untuk pengendalian manajemen oleh suatu organisasi atau perusahaan.

#### **2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Pengendalian Manajemen Sektor Publik**

Tujuan pengendalian manajemen adalah untuk memotivasi dan memberi semangat kepada para anggota organisasi, dan selanjutnya mencapai tujuan organisasi. Ini merupakan proses mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dan ketidakberesan yang disengaja, seperti pencurian atau penyalahgunaan sumber daya. Karena fokusnya pada manusia dan implementasi rencana, pertimbangan psikologis menjadi dominan dalam pengendalian manajemen. Kegiatan-kegiatan seperti komunikasi, meyakinkan, mendesak, memberi semangat, dan memberi kritik adalah bagian penting dalam proses ini.

Adapun fungsi Pengendalian Manajemen adalah pengukuran dalam perbaikan terhadap pelaksanaan tujuan dan rencana perusahaan dapat dicapai. Pengendalian manajemen juga dapat berfungsi untuk mengembangkan dan merevisi norma-norma (*standard*) yang memuaskan sebagai ukuran pelaksanaan dan menyediakan pedoman serta bantuan kepada para anggota manajemen yang lain dalam menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan yang sebenarnya terhadap norma standard.

Disini pengendalian manajemen mencoba agar pelaksanaan sesuai dan cocok dengan rencana atau standard. Juga dalam fungsi ini, controller dapat membantu. Dia tidak memaksakan pengendalian, kecuali dalam departemennya sendiri, tetapi dia menyediakan informasi yang akan digunakan oleh pimpinan fungsional untuk mencapai pelaksanaan yang diharuskan.

Kegiatan dalam bidang pengendalian ini menghabiskan waktu yang cukup banyak. Sebagian informasi disediakan dari jam ke jam atau dari hari ke hari. Data lain disiapkan dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan, sesuai dengan kebutuhan keadaan. Sebagai contoh, pada perusahaan yang lebih besar, informasi per jam atau per hari tentang pelaksanaan belum mungkin berguna, atau biaya-biaya pengolahan per minggu mungkin dibutuhkan.

Dalam pendekatan masalah-masalah yang berhubungan dengan fungsi pengendalian manajemen, suatu pandangan yang luas biasanya akan banyak membantu. Hasil akhir dari fungsi pengendalian tidak hanya berupa suatu laporan atau prestasi kerja, melainkan seharusnya juga mencakup pertimbangan – pertimbangan berikut ini :

1. Bantuan terhadap norma-norma untuk pengendalian.
2. Evaluasi terhadap norma standard, termasuk analisa yang berhubungan dengan hal itu.

3. Pelaporan tentang prestasi pelaksanaan jangka pendek yang sesungguhnya dibandingkan dengan kerja yang telah distandardkan. Pengembangan trend dan hubungan-hubungan untuk membantu para pimpinan operasional.
4. Memastikan bahwa melalui tujuan yang berkesinambungan, sistem dan prosedur dapat menyediakan data yang diperlukan dan yang paling berguna atas basis yang paling praktis dan ekonomis.

Disini jenis pengendalian yang baik adalah yang melihat ke depan. Ini harus diingat oleh manajemen apabila dia berpartisipasi dalam fungsi pengendalian manajemen dengan memberikan pemikiran yang terus menerus terhadap langkah-langkah yang mungkin perlu diambil sebelum dimulai tindakan operasi untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan norma atau yang diinginkan. Ini dapat dinamakan sebagai pengendalian preventif (*preventive control*).

Anthony dan Govindarajan (2005) menjelaskan bahwa pengendalian manajemen adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh badan pengawas organisasi, pimpinan utama (manajemen), dan pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut: a) Efektivitas dan efisiensi kegiatan b) Keterandalan pelaporan keuangan c) Ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut indikator

yang dapat mengungkapkan pentingnya sistem pengendalian manajemen adalah:

1. Diperolehnya keterandalan dan integritas informasi.
2. Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
3. Melindungi aset organisasi
4. Pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien.

#### **2.1.1.3 Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Pengendalian Manajemen Sektor Publik**

Manajemen bertanggungjawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian intern organisasinya. Direktur utama perusahaan bertanggungjawab untuk menciptakan atmosfer pengendalian di tingkat puncak, agar kesadaran terhadap pentingnya pengendalian menjadi tumbuh diseluruh organisasi.

### **2.1.2 Akuntabilitas**

#### **2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2002): “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi

amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawabam (LAN,2003).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.71 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah adalah :

“ Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah suatu kewajiban bagi petugas yang diberikan amanah untuk memberikan pertanggungjawaban yang menerangkan kinerja yang tercapai kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **2.1.2.2 Dimensi Akuntabilitas**

Elwood (1993) yang dialih bahasakan oleh Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa ada empat dimensi Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh Organisasi Sektor Publik termasuk Pemerintah Daerah. Empat dimensi tersebut adalah :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas Kejujuran (*Accountability for Probity*) terkait dengan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) sedangkan Akuntabilitas Hukum (*Legal Accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*) termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang tepat, responsive dan murah biaya. Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Proses dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark-up* dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan.

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas Program (*Program Accountability*) terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*) terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah

atas kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah terhadap DPR/ DPRD dan Masyarakat luas.

Dalam pasal 3 Undang-Undang No.28 tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ Asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanah harus mempertanggungjawabkan kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan.

#### **2.1.2.3 Ciri-ciri Akuntabilitas**

Ciri-ciri Akuntabilitas yang berkualitas menurut Sadeli (2008: 104) adalah :

1. Akuntabilitas Keuangan Berisi Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program dan aktivitas pemerintahan, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Keuangan Berisi Penilaian Kinerja Keuangan

Akuntabilitas keuangan harus berisi pengungkapan penilaian kinerja keuangan dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas serta

pengungkapan penilaian pencapaian tujuan (*output*) yang telah dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut (*outcome*).

3. Akuntabilitas Keuangan dibangun Berdasarkan Sistem Informasi Yang Andal

Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan Sistem Informasi yang andal. Informasi yang andal (*reliable informasi*) sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi resiko. Reliabilitas informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netralitas dalam pengungkapan.

4. Akuntabilitas Keuangan Harus dinilai Secara Objektif dan Independen

Untuk menjamin rehabilitas informasi yang terdapat pada Akuntabilitas Keuangan perlu adanya pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan atas keandalan informasi yang disajikan dalam Akuntabilitas. Adanya penilaian yang Objektif dan Independen atas Akuntabilitas Keuangan merupakan ciri dari Akuntabilitas yang efektif.

#### 2.1.2.4 Kriteria Akuntabilitas

Ramadhani (2011) menyebutkan bahwa kriteria dalam akuntabilitas mencakup beberapa hal, antara lain adalah:

a. Pertanggungjawaban dana publik.

Tujuan dari laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

b. Jenis dan bentuk laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas (Nordawan; Iswahyudi dan Maulidah, 2007: 151). Jenis dan bentuk laporan keuangan Badan Layanan Umum menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 adalah laporan realisasi anggaran atau laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan mengenai kinerja. Pedoman yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BLU sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

c. Penyajian tepat waktu

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah melalui penyampaian laporan keuangan yang

memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyajian laporan keuangan BLU menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Pasal 27 ayat (5) paling lambat satu bulan setelah periode pelaporan berakhir. Penyajian laporan keuangan yang tepat waktu menjadi bukti adanya kepatuhan pengelola keuangan terhadap peraturan yang mengatur jangka waktu pembuatan laporan keuangan (Kasijan, 2009: 55).

d. Pemeriksaan (audit)

Salah satu perbedaan mendasar dari pengelolaan keuangan badan layanan umum, adalah fleksibilitas dalam menggunakan kas yang berasal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program-program yang telah dibiayai dengan menggunakan keuangan negara, tingkat kepatuhan pada peraturan yang berlaku serta mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan atau pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

e. Respon yang cepat

Setelah menerima hasil dan opini audit atas laporan keuangan, maka pihak pembuat laporan harus merespon dengan cepat terkait kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan oleh auditor. Hasil audit harus direspon dengan cepat oleh pihak pembuat laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dan instropeksi diri guna mencapai hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.

### **2.1.3 Laporan Keuangan Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan Keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku agar Laporan Keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan Laporan Keuangan entitas yang jelas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud pengguna disini adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/ pengawas, pihak

yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan.

Pengguna laporan keuangan pemerintahan menurut *International Federation of Accountants- Publik Sector Committe* ( IFA-PSC) adalah :

1. Badan legislatif dan badan-badan lain yang kekuasaan mengatur dan menguasai.

Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber, ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan kondisi keuangan maupun kinerja.

2. Rakyat

Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan yang terdiri dari para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah.

### 3. Investor dan Kreditur

Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada investor dan kreditur pemerintah yang pada akhirnya akan berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban pada komitmentnya.

### 4. Pemerintah Lain, Badan Internasional dan Penyedia Sumber Lain

Seperti pada Investor dan kreditur bahwa pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan pemerintah selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan.

### 5. Analisis Ekonomi dan Keuangan

Pada analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah adalah :

1. Masyarakat,
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa,
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan
4. Pemerintah.

### **2.1.3.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Mardiasmo (2004:37) tujuan umum penyajian Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah secara garis besar adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan kepatuhan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah adalah :

1. Memberikan informasi laporan keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menialai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan menandai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/ kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/ defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

### **2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Komponen Laporan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional ( LO )
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Selain laporan keuangan pokok seperti disebutkan diatas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory*).

#### **2.1.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan, disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

##### **1. Relevan**

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau mengoreksi kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

##### **2. Andal**

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a) Penyajiannya Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila

entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan bahasa pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai permasalahan tentang sistem pengendalian dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini akan dicantumkan penelitian yang dapat menjadi referensi bagi usulan penelitian ini:

1. Fadri Yanti, dkk (2015), dengan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pemahaman atas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Pengawas Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Aceh di Pemerintah Aceh).” Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pemahaman atas sistem akuntansi

keuangan daerah dan peran pengawas fungsional baik secara simultan maupun parsial terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Aceh di Pemerintah Aceh. Penelitian ini merupakan *hypothesis testing research* dengan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Populasi penelitian merupakan 48 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPA yang ada di Pemerintah Aceh. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemahaman atas sistem akuntansi keuangan daerah dan peran pengawas fungsional secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Aceh, (2) pemahaman atas sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Aceh, dan (3) peran pengawas fungsional berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Aceh.

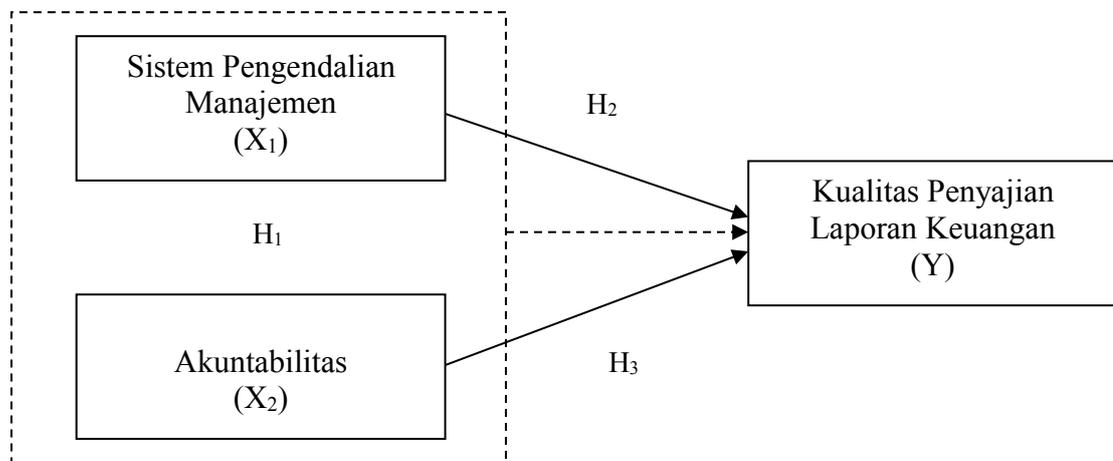
2. Kuasa, Nadirsyah, Syukriy Abdullah (2016) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.” Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi pejabat pengelola keuangan, regulasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Simeulue. Jenis

penelitian bersifat kausalitas dengan menggunakan data sensus sebanyak 38 SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Simuelue.. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan diolah dengan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pejabat pengelola keuangan, regulasi dan pengawasan secara bersama-sama dan terpisah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Simeulue.

3. Muhammad Al Qodri (2015) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Dumai). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari akuntabilitas, pengawasan dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jenis penelitian bersifat kausalitas dengan menggunakan sampel sebanyak 66 PNS yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian dengan regresi berganda menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas keuangan, pengawasan dan penyajian laporan keuangan berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengelolaan laporan keuangan daerah, (2) akuntabilitas keuangan dan penyajian berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan laporan keuangan daerah sedangkan variabel pengawasan disimpulkan tidak berpengaruh signifikan.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, tinjauan teoritis membentuk kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan Variabel Y yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah disusun maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Sistem pengendalian manajemen dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan daerah.

- H<sub>2</sub> : Sistem pengendalian manajemen berpengaruh secara parsial terhadap kualitas penyajian laporan keuangan daerah.
- H<sub>3</sub> : Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas penyajian laporan keuangan daerah.
- H<sub>4</sub> : Salah satu dari variabel yang dipergunakan antara sistem pengendalian manajemen dan akuntabilitas memiliki pengaruh dominan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan daerah.